**Mengabadikan Potret Reformasi**

**Resensi Buku “Reformasi adalah Keniscayaan, Perubahan adalah Kebutuhan: Cerita di Balik Reformasi Perpajakan”**

**Penulis: Edmalia Rohamani**

Ada yang istimewa di peringatan Hari Pajak tahun 2021 ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi akan meluncurkan buku “Reformasi adalah Keniscayaan, Perubahan adalah Kebutuhan: Cerita di Balik Reformasi Perpajakan.”

Buku ini memotret perjalanan sejarah DJP sejak Reformasi Perpajakan Jilid I di tahun 2000 hingga proses Reformasi Perpajakan Jilid III yang masih berlagsung hingga saat ini. Dibawakan dengan gaya bertutur yang menarik, buku ini ditulis oleh 18 penulis yang berprofesi sebagai pegawai DJP. Hal ini menjadikan buku tersebut menawarkan keintiman yang lebih kepada pembaca.

Narasumber yang didapuk untuk diwawancarai juga tak main-main. Tak kurang 46 orang baik dari internal maupun eksternal menjadi rujukan. Bahkan, dua tokoh yang pernah menjadi orang nomor satu DJP turut memberikan bocoran kisah-kisah yang tak banyak diketahui publik. Namun tenang saja, karena menggunakan gaya penulisan *feature*, buku ini dijamin tak membuat dahi pembaca berkerut.

Yang menarik dari pembuatannya, sebagian besar dari sesi pra-penulisan, wawancara narasumber, proses penulisan hingga naik cetak dilakukan secara daring di masa pembatasan fisik selama pandemi. Hal ini tentu memompa adrenalin dan memberikan tantangan tersendiri. Apalagi, tak semua penulis berada di satu kota yang sama. Waktu yang sempit di sela-sela pekerjaan yang menghimpit dan sinyal yang kadang sulit diakses adalah ragam kisah tak terbaca dari lembaran-lembaran buku ini.

**Sepuluh Bagian**

Untuk memudahkan pembaca, buku ini dibagi menjadi sepuluh bab. Bab pertama menjadi semacam jembatan yang mengantarkan pembaca ke bab-bab berikutnya. Ia menyajikan kisah Reformasi Jilid I, Jilid II, cerita-cerita di balik Amnesti Pajak, AEoI (*Automatic Exchange of Information*), hingga proses awal Reformasi Perpajakan Jilid III.

Bab kedua secara detail menguraikan bagaimana institusi DJP berusaha menegakkan lima pilar yang menjadi penopang reformasi. Lima pilar itu adalah organisasi, sumber daya manusia (SDM), sistem informasi teknologi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Menariknya, bab ini juga mengisahkan keterlibatan pihak di luar DJP yang ikut terlibat dalam menegakkan lima pilar tersebut.

Karena proses reformasi adalah perjalanan yang panjang dan memerlukan penanda haluan, bab ketiga hadir menuturkan pencapaian-pencapaian reformasi. Meski masih banyak pekerjaan rumah yang menuntut untuk diselesaikan, namun tak dapat dipungkiri, tengara (*landmark*) ini menjadi pengingat bahwa DJP terus bergerak untuk menyelesaikan misi-misi reformasi.

Bab keempat meriwayatkan perjuangan modernisasi sistem informasi DJP yang mencakup keseluruhan fungsi inti administrasi perpajakan (*core tax system*) berhasil dieskalasi sampai ke pimpinan tertinggi negeri ini. Puncaknya, Peraturan Presiden (PP) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) ditandatangani Presiden RI. Tak cukup di situ, bab ini juga mengisahkan pembentukan tim di dalam tim PSAP yang khusus didedikasikan untuk fokus mengerjakan *core tax system* yaitu tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Bab selanjutnya menguak lima hal yang menjadikan pengadaan sistem inti administrasi perpajakan ini berbeda dari pengadaan-pengadaan DJP lainnya. Menurut salah satu narasumber, ini adalah salah satu proses pengadaan yang belum pernah dilakukan di dunia! Bahkan, saking spesialnya, proses pengadaan barang dan jasa mesti dibagi menjadi empat paket!

Tak melulu tentang *core tax system*, buku ini juga menangkap momen-momen koalisi reformasi dengan berbagai pihak di luar DJP seperti Presiden, para pejabat pemerintahan, para wakil rakyat, organisasi internasional, hingga para wartawan. Memang, sejatinya keberhasilan reformasi perpajakan di negara kita adalah urusan masyarakat luas dan bukan DJP *an sich*.

Selain kolaborasi dengan pihak luar, di sisi internal tentu banyak kisah yang layak diungkapkan. Bab tujuh menceritakannya dengan menarik dan unik, termasuk momen menedebarkan ketika Menteri Keuangan turut mendengarkan percakapan antara wajib pajak dengan agen Kring Pajak khusus *Tax Amnesty*.

Organisasi yang paling kuat bertahan di masa terjangan badai adalah institusi yang punya daya resiliensi tinggi. Bab delapan menguraikan bagaimana DJP secara liat dan tangkas tetap bergerak maju memutar roda reformasi di tengah terpaan pandemi. Isu-isu strategis negara dikupas di sini termasuk tentang lika-liku *omnibus law* yang sempat hangat dibicarakan hingga Undang-Undang Cipta Kerja yang akhirnya berhasil diterbitkan.

Dua bab terakhir memberikan pelengkap perjalanan bahtera reformasi. Bab sembilan mengetengahkan kisah para nakhoda yang memberikan komando selama mengarungi bahtera itu. Ken Dwijugiasteadi, Robert Pakpahan, dan Suryo Utomo merawikan masa-masa penuh gejolak di tiap-tiap fase reformasi yang menjadi pengampuannya.

Bab sepuluh menjadi bingkai bab-bab sebelumnya sekaligus memberi sinyal bahwa proses reformasi akan terus berjalan bahkan hingga ketika SIAP sudah berjalan. Bab ini juga memberikan petunjuk kenapa bangsa kita harus merayakan Hari Kemerdekaan Kedua ketika hal itu terjadi. Bisa jadi, saat itu kita tak perlu lagi iri dengan warga negara Finlandia.

**Ingatan adalah Sejarah**

Menurut I. L. Peretz, ingatan manusia adalah sejarah. Sebagaimana seseorang yang hidup tanpa ingatan, orang-orang yang hidup tanpa memiliki sejarah takkan bisa berkembang dengan bijak, lebih baik.

Sayangnya, ingatan manusia tak sepanjang umur peradaban. Ia kadang hilang dan tenggelam dalam riuh peristiwa yang silih berganti mengisi bingkai potret negeri. Hanya pena dan aksara yang mampu memerangkapnya. Dan seketika kerja-kerja nyata itu menjadi abadi. Selamat membaca dan menjadi saksi dari keabadian potret sejarah reformasi kami!